

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah harus mengacu pada pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pembangunan menjadi suatu landasan yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan, namun dalam penyelenggaraannya pembangunan yang dilakukan masih belum dapat dirasakan dan perlu dikembangkan secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau-pulau tentu pemerataan penyebaran penduduk tidak sebanding dengan laju infrastruktur yang dapat menjadi akses saling terkait satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini menjadi faktor penghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembangunan nasional yang tidak adanya pemerataan pembangunan.

Mengatasi pembangunan yang tidak merata maka terdapatlah otonomi daerah yang pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.¹ Oleh karena itu terdapatnya desa yang tentunya memiliki peranan

¹Nadir, Sakina. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1.

yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.³ Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.⁴

Menurut Eddi Handono dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam,

² Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. Rajawali Pers.

³ Soetardjo, Kartohadikoesoemo. (1984) *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 280.

⁴ Talizihudu, Ndraha. (1981). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. , Jakarta: PT Bina Aksara. hlm. 13.

sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.⁵

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berarti terjadinya perubahan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional. Paradigma yang awalnya paradigma pembangunan desa menjadi desa membangun. Undang-undang Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Berarti desa tidak lagi sebagai objek pembangunan semata yang hanya menjadi objek program-program sektoral, sekarang desa menjadi suatu subjek pembangunan. Sesuai dengan NAWACITA Jokowi-Jk khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan agar mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.⁷ Sehingga kuatnya desa secara kelembagaan dalam struktur pemerintahan, tidak hanya penguatan desa secara kelembagaan tetapi juga dikuatkan dengan adanya anggaran yang disebut Dana Desa dimana setiap desa menerima anggaran sekitar Rp 1 Miliar. Pemerintah desa dituntut

⁵ Eddie B. Handono. (2005). Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. FPPD, Yogyakarta. hlm. 132.

⁶ Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Melalui alokasi dana desa, desa mempunyai peluang untuk mengelolah pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom⁸.

Pemerintah desa dalam membangun dan melaksanakan program desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang diperoleh oleh pemerintahan desa, baik itu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan lain desa. Dengan dana yang dimiliki desa, diharapkan desa mampu menjalankan pemerintahannya untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dengan mewujudkan program-program pembangunan dan lain sebagainya. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan program pemerintah desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antardesa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

⁸ Habriono, H. (2008). ADD: Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?, Majalah Mudik “Media Pembaharuan Desa” Edisi 10 Agustus 2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.⁹ Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara desa dengan desa lain dalam satu kecamatan maupun antara desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Untuk desa yang melakukan kerjasama antar desa dalam satu kabupaten/kota yang sama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Kerjasama desa juga dapat dilakukan dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga terdiri dari kerjasama atas prakarsa desa maupun kerjasama atas prakarsa pihak ketiga yang mana pelaksanaannya diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

Kerjasama Pemerintahan Desa yang dilakukan dengan kerjasama antar desa yang mana kerjasama yang dilakukan sebagai sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa.¹⁰ Untuk mencapai tujuan dalam kerjasama tentunya pihak yang terlibat mampu melaksanakan hal yang disepakati bersama, agar tidak hanya salah satu pihak saja yang merasakan keberhasilan dari kerjasama tersebut. Tidak hanya kerjasama antar desa, Pemerintah Desa juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga desa atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

¹⁰ Ratnasari, Marista. (2010). Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

dalam kebutuhan masyarakat juga harus ditampung dan digali oleh lembaga desa. Kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan tampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara BPD dan pemerintahan Desa yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.¹¹

Selanjutnya kerjasama Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan pihak swasta/pihak ketiga. Sinergi antara pemerintah desa dan sektor swasta dapat dilakukan dalam memberikan berbagai pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat yang dihasilkan dari pola kerjasama tersebut kemudian diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan daya saing dan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan tersebut menyangkut proses perbaikan dari kondisi yang satu ke kondisi lain. Dalam perkembangan pembagian peran antara pemerintahan dan pihak swasta tersebut, terdapat titik tekan yang sama yakni masih diperlukannya peran pemerintah.¹² Kerjasama antara Pemerintahan Desa dan pihak swasta juga dapat membantu perkembangan dan kemajuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya.

¹¹ Almunandar, A., & Muttaqin, Z. (2019). Kerjasama Bpd Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa. *Civocis : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 63

¹² Nugroho. Sri (2017). Membangun Konsensus dan Mengelola Konflik Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Air Bersih. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta*. 5(1), 1–5.

Dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai kerjasama Pemerintahan Desa, peneliti menemukan kelemahan dari penelitian terdahulu tersebut, yang mana belum adanya menyinggung atau belum menjelaskan bagaimana kerjasama Pemerintahan Desa dengan perantau dalam mengelolah potensi perantau untuk pembangunan desa. Di Sumatera Barat perantau memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan nagari. Perantau ikut berpartisipasi dalam pembangunan nagari asalnya, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, tetapi perantau juga menyumbangkan ide-ide ataupun saran dan juga jejaring (*link*) kepada nagari agar Pemerintahan Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang diusulkan oleh perantau. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Annisa Aulia Putri, 2019) mengenai partisipasi perantau di Nagari Sungai Pua, bahwa Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan nagari. Di rantau mereka ikut menyumbang secara spontan dalam pembangunan di Sungai Pua, yaitu dengan mengumpulkan dana melalui IKPS dan menyalurkannya ke Nagari¹³.

Menurut Mochtar Naim, sejak kebiasaan merantau dikenal masyarakat minangkabau, maka sejak itulah dana atau sumbangan perantau mengalir ke kampung halaman, guna berbagai pembangunan¹⁴. Perantau dilihat dari sudut pandang administratifnya bukan bagian dari penduduk nagari, tetapi perantau bagian dari masyarakat nagari. Oleh karena itu, perantau masih memiliki tanggung jawab dalam pembangunan yang ada di Nagari, baik pembangunan fisik maupun nonfisik yang

¹³ Putri, A. (2019). Partisipasi Perantau; Basamo Mambangun Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 42-54.

¹⁴ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1979

menjadi kemajuan bagi nagarinya. Itulah kekuatan dari perantau yang masih ikut bertanggung jawab atas kemajuan nagari asalnya dan jikalau masyarakat nagari membutuhkan bantuan dari perantau, maka perantau tidak akan segan-segan dalam membantu.

Salah satu nagari di Kabupaten Solok yang memiliki jumlah perantau yang cukup banyak adalah Nagari Sulit Air. Tidak hanya memiliki jumlah perantau yang cukup banyak, perantau Nagari Sulit Air juga memiliki organisasi perantau dengan menggunakan nama “Sulit Air Sepakat/SAS” yang sekarang memiliki 97 cabang di dalam dan diluar negeri sebagai wadah perkumpulan perantau Sulit Air. Pada tahun 2007 Sulit Air Sepakat (SAS) resmi berbadan hukum yang telah dicatat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 Maret 2007 Nomor: C-19.ht.01.03.TH.2007.

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, sebagian besar dari masyarakat hidup di rantau. Hal ini dikarenakan Nagari Sulit Air dikelilingi oleh jajaran bukit-bukit batu dan kapur serta gundul yang tidak memberikan kesuburan pada tanahnya. Sehingga tidak mampu memberikan kehidupan ekonomi yang baik dan layak bagi penduduknya pada sektor pertanian.¹⁵ Karena keadaan geografis yang dimiliki Nagari Sulit Air dengan kondisi yang tidak menjanjikan untuk perbaikan perekonomian. Marantau merupakan jawaban bagi masyarakat Nagari Sulit Air terhadap kondisi alam yang tidak

¹⁵ Asri, Zul dkk. (1996). Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan Kenagarian Sulit Air Kabupaten Solok Sumatera Barat. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang.

mendukung. Kondisi itu, menjadi faktor pendorong masyarakat Nagari Sulit Air pergi merantau. Perantau asal Nagari Sulit Air pergi merantau didorong oleh faktor ekonomi, dan keinginan mendapatkan hidup yang layak¹⁶.

Dilihat dari historisnya, perantau Sulit Air telah lama membantu nagari untuk pembangunan Nagari Sulit Air. Bantuan perantau kepada Nagari Sulit Air baik itu dibidang pendidikan, pembangunan nagari, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, seperti pada pembangunan puskesmas pada tahun 1972 dan dilanjutkan dengan pembangunan masjid raya pada tahun 1975 serta pembangunan masjid-masjid lainnya dan mushalla-mushalla. Perantau juga membangun kantor jorong dan juga pembangunan jalan nagari. Pada tahun 1977 perantau bekerjasama dengan pemerintah untuk pemasukan air minum di Sulit Air dan pada tahun 1978 perantau membangun perguruan muhammadiyah.¹⁷

Pada bidang pendidikan, terdapat 12 Sekolah Dasar, 3 SLTP dan 3 SLTA (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah) baik itu pembangunan maupun perbaikan yang dilakukan oleh perantau.¹⁸ Tidak hanya pembangunan tapi perantau juga memberikan fasilitas seperti labor dan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan serta memberikan beasiswa kepada murid yang berprestasi maupun yang kurang mampu. Di bidang ekonomi banyak bantuan perantau yang diberikan dengan

¹⁶ Huri, I. (2006). *Filantropi kaum perantau: studi kasus kedermawanan sosial organisasi perantau Sulit Air Sepakat (SAS), Kabupaten Solok, Sumatera Barat*. Piramedia.

¹⁷ Ajiswarman. 1996. Partisipasi Perantau Minang dalam Pembangunan Pedesaan (kasus Perantau asal Sulit Air dalam organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) Cabang Menteng Jakarta Selatan). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

¹⁸ Addiarrahman. (2013). Baragiah Ka Kampuang: Spirit Filantropis Perantau Sulit Air. Turast; *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(1), 67–80.

melakukan program-program di nagari, seperti pembangunan BPR Surya Katialo, pengolahan lahan kritis, hortikultura dan pemberian 500 ekor sapi untuk ditenakkan oleh masyarakat nagari.

Di bidang kesehatan selain membangun puskesmas, perantau juga mengadakan operasi katarak yang dilakukan pada tahun 1996, dan juga mengadakan sunat massal. Di bidang budaya perantau ikut mengadakan alat kesenian seperti alat musik yang dapat digunakan oleh anak nagari serta pembangunan dan renovasi *rumah gadang* dan *balairungsari*. Bantuan yang diberikan perantau tidak melihat apakah objek yang dibantu tersebut merupakan kewenangan nagari ataupun kewenangan Pemerintah Daerah. Seperti halnya pembangunan mushalla dan pagar di SMP dan renovasi Mushalla dan pagar di SMA, dimana kewenangan Pemerintah Nagari hanya sebatas paud, tetapi perantau dapat menyalurkan bantuannya sampai ke tingkat SMA yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan memberikan bantuan berupa uang dan mengirim uang untuk biaya pembangunan inilah yang menjadi kekuatan perantau untuk ikut membangun kampung halamannya. Hal tersebut dapat terjadi atas kepedulian perantau Sulit Air terhadap nagarinya. seperti yang dikatakan Zakarsyih Nurdin (Mantan Ketua Umum Sulit Air Sepakat):

”Ketika Masjid Raya Sulit Air akan direhabilitasi dan membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar, begitu kabar itu diumumkan, dana segera terkumpul. Donatur untuk dana sebesar itu cuma berasal dari empat orang. Memang susah dinalar, tapi ini modalnya kecintaan pada kampung halaman”.¹⁹

Infrastruktur yang terdapat di Nagari Sulit Air terwujud berkat gotong royong para perantaunya. Lebih dari separuh pembangunan infrastruktur di Sulit Air berasal dari dana perantaunya. Wali Nagari Sulit Air Alex Suryani mengatakan:

“Nagari Sulit Air dengan luas 80 kilometer persegi memang sejak dulu bergantung pada bantuan perantau karena sulitnya mendapat anggaran pembangunan dari pemerintah daerah dan juga Kepedulian perantau memang sangat kuat membangun Sulit Air”.²⁰

Hal ini sejalan dengan penelitian Syamsurizaldi, Putri dan Antoni yang melakukan penelitian pada 9 (sembilan) nagari yang meraih juara 1, 2 dan 3 lomba Nagari Rancak tingkat provinsi tahun 2015, 2016 dan 2017. Bahwa keberhasilan nagari tersebut tidak terlepas dari aktor stakeholder yaitu dukungan moral dan material serta rasa memiliki nagari yang tinggi dari para perantau sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan pembangunan nagari.²¹ Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh perantau dalam pembangunan nagari sangat besar, sehingga pemerintah nagari maupun pemerintah kabupaten memposisikan kedudukan perantau, baik itu dengan melakukan kerjasama maupun memfasilitasi perantau untuk membangun nagari.

¹⁹ <https://x.detik.com/detail/intermeso/20160613/Kisah-Sulit-Air-dan-Orang-orang-Kaya/index.php>. Diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 20.43

²⁰ <https://x.detik.com/detail/intermeso/20160613/Kisah-Sulit-Air-dan-Orang-orang-Kaya/index.php>. Diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 20.43

²¹ Syamsurizaldi, dkk. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 99–121.

Tabel 1.1
Jumlah Sumbangan Perantau Tahun 2015 – Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pendidikan	291.200.000	671.200.000	130.200.000	60.200.000
2	Pembangunan Nagari	250.000.000	1.915.00.000	46.000.000	206.000.000
3	Kesehatan	1.000.000	1.000.000	-	-
4	Ekonomi	-	50.000.000	-	-
5	Sosial	300.000.000	2.280.000.000	-	59.400.000
6	Pkk	-	20.000.000	-	-
Jumlah		842.200.000	4.937,200,000	176,200,000	325,600,000

Sumber: Dokumen Pemerintahan Nagari Sulit Air 2018

Dari Tabel 1.1 mengenai jumlah sumbangan perantau yang diberikan ke Nagari Sulit Air, dapat dilihat sumbangan perantau yang mengalir untuk pembangunan nagari begitu besar. Perantau tidak hanya memberikan bantuan untuk pembangunan fisik yang dilakukan nagari tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan juga Untuk PKK Nagari. Jumlah sumbangan dari perantau tersebut tidak masuk ke rekening maupun RAB Nagari, melainkan perantau secara spontan memberikan dana tersebut ke masyarakat maupun ke tokoh yang berperan dalam pembangunan tersebut. Jadi sumbangan perantau hanya tercatat di pemerintah nagari jikalau perantau atau penerima bantuan tersebut melapor ke nagari.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang fenomena perantau Nagari Sulit Air adalah penelitian yang dilakukan oleh Addiarrahman yang menemukan bahwa masyarakat Sulit Air memiliki *social capital* yang berdiri di atas nilai-nilai kearifan yang mereka percayai. Motivasi filantropi utama perantau Sulit Air yang mereka miliki diekspresikan dalam bentuk tradisi *baragiah ka kampuang*, sehingga menjadi *social capital* yang sangat bermanfaat untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat

Sulit Air pada umumnya. Tak lain, ini merupakan dorongan adat yang begitu kuat dalam diri mereka. Sebesar apapun perilaku filantropi perantau Sulit Air, bila tidak dikelola dengan basis nilai atau *sense of culture*-nya sendiri, krisis nilai adalah buahnya.²² Dari penelitian tersebut dalam pembangunan nagari melalui semangat rantau, tidak hanya dari semangat yang ada pada diri perantau tersebut, tetapi juga diiringi dengan budaya yang ada pada nagari tersebut.

Selanjutnya penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Addiarrahman yang mengatakan bahwa Aktivitas filantropi kaum perantau Sulit Air merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dan terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Akan tetapi, tata kelola modal sosial ini masih bersifat tradisional, sehingga efektifitas dan efisiensi dari aktifitas filantropi yang dilakukan cenderung tidak berkesinambungan. Masalah ini diatasi dengan merancang ulang program-program atau aktifitas strategis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.²³ Jadi perlunya inovasi yang dilakukan oleh perantau dalam membangun nagari atau adanya suatu sistem informasi yang disediakan oleh SAS sebagai basis organisasi perantau Sulit Air yang dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

²²Addiarrahman. (2013). Baragiah Ka Kampuang: Spirit Filantropis Perantau Sulit Air. Turast; *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(1), 67–80.

²³ Addiarrahman. (2019). Kearifan Lokal dan Aktifitas Filantropi Perantau Sulit Air Sepakat (SAS) dalam Menghadapi Revolusi Industri 4 . 0. Vol. 13, No.1, Juni 2019 : 177-200

Dari penelitian diatas dapat dikatakan bahwa perantau Nagari Sulit Air ikut terlibat dalam pembangunan nagari dengan semangat filantropi adat budaya Minangkabau. Perantau Sulit Air memiliki suatu bentuk filantropi yang dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam halnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, dan lain sebagainya yang di setiap aspek merupakan bentuk dalam pembangunan nagari. Sehingga menunjukkan swadaya rantau dapat menjadi potensi yang besar bagi pembangunan nagari. Sesuai dengan hasil penelitian Muhadi Barta bahwa kedudukan Sulit Air Sepakat (SAS) juga berperan sebagai partner Pemerintah sebagai penggerak swadaya masyarakat serta membantu Pemerintah dalam upaya pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.²⁴

Menurut Penelitian yang dilakukan Ajiswarman yang menemukan bahwa dalam hal pembangunan nagari, perantau Nagari Sulit Air dengan organisasinya yaitu Sulit Air Sepakat cukup besar perannya. Pembangunan yang dilakukan SAS dalam 2 bentuk, pertama dalam bentuk pembangunan fisik material, dan kedua dalam bentuk pembangunan rohani atau mental spiritual. Pembangunan yang dilakukan oleh SAS yang terkesan lebih ke pembangunan fisik. Namun sudah mulai diarahkan pada bantuan yang lebih produktif, agar lebih meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Seperti pembangunan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang dananya

²⁴ Daud, M. B. (2013). Peran Sosial Paguyuban Sulit Air Sepakat dalam rangka Mengembangkan Institusi Sosial Masyarakat Perantau Asal Nagari Sulit Air Sumatera Barat di Yogyakarta

dari perantau, investasi 50 ekor sapi dan 500 ekor kambing, pengembangan usaha-usaha kerajinan, pengembangan usaha bahan bangunan, dll.²⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Indraddin dkk bahwa terdapat kaitan yang erat antara remitan migran internasional dengan remitan yang berasal dari perantau domestik. Hal ini terkait dengan ikatan perantau asal nagari tersebut. Ikatan perantau nagari sulit air misalnya, keberadaan organisasi Sulit Air Sepakat (SAS), tidak terlepas dari dukungan perantau yang ada di luar negeri dan dalam negeri juga. Pengiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung terkoordinasi dan menyatu dalam organisasi tingkat pusat yang selanjutnya dikirim ke kampung halaman. Orang yang diharapkan turun langsung menyampaikan bantuan biasanya pengurus pusat yang berkedudukan di Jakarta.²⁶

Hal ini sesuai dengan temuan Ismawati yang mengatakan bahwa Pola pengiriman dilakukan perorangan melalui wesel pos, transfer bank, menitipkan pada teman atau langsung oleh perantau saat menjelang hari lebaran. Selain diserahkan secara langsung, pengiriman remitan diwujudkan dalam bentuk sumbangan yang digalang dan didistribusikan oleh organisasi sosial baik yang dibentuk di rantau maupun di ranah.²⁷ Dari proses pengiriman, temuan penting adalah bahwa terdapat dua jenis pengiriman yang dilakukan oleh perantau ke kampung halaman, pertama

²⁵ Ajiswarman. 1996. Partisipasi Perantau Minang dalam Pembangunan Pedesaan (kasus Perantau asal Sulit Air dalam organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) Cabang Menteng Jakarta Selatan). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

²⁶ Indraddin et al (2015). Pemberdayaan Institusi Lokal Dalam Pemanfaatan Remitan Migran Internasional Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Artikel Ilmiah Penelitian Strategi Nasional* Oleh: Universitas Andalas November 2015. (November), 1-15

²⁷ Ismawati, Iis (2016). Prospek Pengelolaan Remitan Dari Rantau Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Di Sumatera Barat. Pertanian Negari Payakumbuh. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian 2016*

kiriman yang ditujukan untuk keluarga, kedua kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman.

Dalam pengelolaannya mulai dari proses pengiriman bantuan dana maupun dari perantau untuk pembangunan Nagari Sulit Air dapat dikatakan belum terkelolah dengan baik, baik itu pengiriman yang dilakukan oleh organisasi perantau (SAS) maupun oleh perantau itu sendiri.²⁸ Ditambah dengan Pemerintah Nagari Sulit Air tidak memasukkan bantuan dana dari perantau sebagai swadaya masyarakat ataupun dana hibah yang dapat dicatatkan dalam dokumen Anggaran dan Belanja Pemerintahan Nagari, sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, semua pendapatan yang masuk ke desa harus tercatat pada Pemerintah Desa, sehingga nagari hanya sebatas mengetahui besaran dana yang diberikan oleh perantau untuk pembangunan nagari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizaldi, Annisa Aulia Putri, Miftahul Viona Sari, Ridho Yoliandri yang melakukan penelitian mengenai bentuk dan tingkat partisipasi perantau dalam pembangunan nagari di Kabupaten Solok sebelum dan sesudah adanya UU Desa. Pada penelitian ini, partisipasi perantau di Nagari Sulit Air berada pada tingkatan *partnership*. Dana yang diberikan oleh perantau merupakan pelengkap dari dana desa. Tahap perencanaan dilakukan oleh pemerintah nagari bersama dengan masyarakat di nagari, lalu disampaikan kepada perantau melalui forum resmi, kemudian perantau mengucurkan bantuan. Oleh karena

²⁸ Indraddin, op.cit., hlm 11.

itu, tidak terjadi tumpang tindih antara perantau dan pemerintah nagari, dan pembagian kewenangan menjadi jelas.²⁹

Dari beberapa riset-riset terdahulu mengenai perantau Sulit Air, belum ada yang membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sulit Air dengan Perantau Sulit Air, padahal Pemerintah Nagari Sulit Air telah melakukan suatu kerjasama dengan perantau. Dalam hal ini menjadi hal penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan kajian pada kerjasama antara Pemerintah Nagari Sulit Air dengan perantau Sulit Air dalam pembangunan nagari.

Pemerintah Kabupaten Solok membuat regulasi mengenai perantau, yaitu Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari Dengan Perantau Kabupaten Solok. Melalui Peraturan Bupati ini, maka menumbuhkan kepedulian dan keikutsertaan perantau untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari sarta adanya rasa tanggung jawab untuk membangun nagari. Sehingga timbulnya semangat gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Adanya bentuk bantuan yang diberikan oleh perantau baik itu bantuan moril maupun bantuan material³⁰. Pemerintah Kabupaten solok dan pemerintah Nagari harus memberikan informasi dan memfasilitasi perantau untuk membangun nagari secara partisipatif dan swadaya melalui kerjasama dengan perantau. Pemerintah Kabupaten Solok juga memiliki data terkait ikatan perantau atau organisasi perantau yang tersebar di dalam dan luar negeri.

²⁹ Syamsurizaldi, dkk. (2020). *Raso Banagari: Ekspresi Sosial Perantau terhadap Pembangunan Kampung Halaman*. *JWS (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol 4, No 1 (2020), 1-16

³⁰ Perbup No 10 Tahun 2017 tentang kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah nagari dengan perantau kabupaten solok.

Dalam hal kerjasama perantau Sulit Air dengan Pemerintahan Nagari, perantau bisa dikatakan terlibat dalam perencanaan pembangunan nagari dengan memberikan ide-ide dan saran. Pada proses perencanaan pembangunan nagari, pemerintahan nagari terlebih dahulu menyusun RPJM dan RKP Nagari yang menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan nagari dan berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan lembaga nagari dan masyarakat nagari. Proses perencanaan pembangunan di nagari Sulit Air selain melibatkan masyarakat dan lembaga nagari, juga melibatkan perantau. Secara legalitas perantau tidak diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik itu pada musrenbang maupun musyawarah nagari. Hal ini pada dasarnya SAS sebagai organisasi memiliki ad/art dan juga SAS memiliki relasi yang terpisah dari pemerintahan nagari. SAS sebagai organisasi perantau yang menjadikan perantau sebagai objek utama untuk menjalin silaturahmi dan membina masyarakat yang ada di rantau.

Perantau Nagari Sulit Air memiliki cara untuk ikut terlibat sebagai bentuk kerjasama dalam perencanaan pembangunan nagari dengan mengadakan Mukernas SAS atau Mubes SAS, karena dalam Mukernas dan Mubes ini perantau dapat memberikan masukan dan ide-ide yang dibutuhkan oleh nagari dalam pembangunan nagari. Musyawarah Besar (Mubes) adalah pertemuan seluruh anggota SAS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan dengan hak anggota untuk mengeluarkan suara melalui sistem perwakilan yang diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga untuk membahas pertanggungjawaban DPP SAS. Sedangkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah pertemuan cabang-cabang yang diselenggarakan oleh DPP SAS di Nagari Sulit Air sebagai organisasi perantau Sulit Air setelah 2 (dua) tahun pelaksanaan Mubes SAS terakhir, untuk membahas perkembangan perkumpulan/evaluasi secara nasional, dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri yang dilakukan untuk menyatukan dan mempererat silaturahmi antara perantau Sulit Air dan masyarakat Nagari Sulit Air yang berada di kampung halaman.³¹

Gambar 1.1
Musyawah Kerja Nasional (Mukernas) SAS 2019



Sumber: berita online Sulit Air Sepakat, diakses pada 26 Oktober 2019 Pukul 19.05

Pada gambar 1.1 dilaksanakan Mukernas SAS 2019 yang dilaksanakan tanggal 6 Juni 2019 di Gedung PSA Gando Sulit Air juga membahas isu-isu pembangunan nagari yang salah satunya adalah rencana pembangunan ulang Masjid

³¹ Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sulit Air Sepakat tahun 2019

Raya Sulit Air menjadi Islamic Center Sulit Air. Acara Mukernas SAS tidak hanya membahas laporan kinerja DPP SAS tetapi juga membahas persoalan yang terjadi di Nagari Sulit Air, baik itu pembangunan maupun kerjasama yang dilakukan pemerintahan nagari dengan perantau.³² Misalnya pada sinkronisasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh nagari, seperti yang dikatakan oleh Bapak Addiarrahman (Ketua SC Mukernas SAS 2019):

“Pada saat Mukernas ataupun Mubes SAS, pihak nagari menyampaikan program-program nagari dan menyinkronkan dengan perantau sehingga apapun program yang dilakukan oleh nagari tidak pernah bisa lepas dari SAS dan Pemerintahan nagari menjadikan SAS sebagai partner dalam pembangunan nagari”. (wawancara dengan Bapak Addiarrahman (pengurus DPP SAS periode 2017-2021) pada 22 September 2019)

Suatu kerjasama dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan yang dibedakan atas: (1), *Handshake Agreement*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis, (2), *Written Agreement*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.³³ Bentuk kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau bersifat langsung dari nagari dengan perantau yang berarti masuk dalam *Handsakhe Agreement*. Oleh sebab itu kesepakatan yang ada langsung dari nagari dan perantau, apakah kerjasama tersebut ada perjanjian kerjasama, Mou atau perantau langsung memberikan bantuan. Sistimnya bisa bantuan lepas, bisa berbentuk mitra atau kerjasama. Seperti bantuan oleh perantau/SAS secara pribadi seperti pembangunan BPR Surya Katialo, pengolahan lahan kritis, holtikultura dan pemberian 500 ekor sapi untuk ditenakkan

³²<https://sas.or.id/home/suarasas/1/78> Diakses pada 26 Oktober 2019 Pukul 19.05

³³ Keban, Jeremias, T. (2007). Membangun Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Dalam Era Otonomi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta

oleh masyarakat nagari. Maka sistemnya hasil keuntungan akan di bagi dengan perantau yang memberikan bantuan. Tetapi perantau atau SAS seringkali hanya bantuan lepas yang mana uangnya tidak bagi hasil ke perantau tapi untuk masyarakat kampung

Kerjasama yang terjadi biasanya berbentuk perantau yang langsung memberikan bantuan berupa bentuk bantuan fisik. Bentuk kerjasama bantuan fisik merupakan bantuan berwujud fisik biasanya berupa sarana - prasarana yang dapat mendukung sesuatu, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih dan pembangunan jembatan. Bentuk kerjasama yang lain yaitu bantuan uang dari perantau ke masyarakat Nagari Sulit Air, baik itu jika ada musibah, berupa beasiswa maupun kepada keluarga yang tidak mampu.

Dalam hal kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau tidak hanya pada pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga ada kerjasama dalam pemberdayaan nagari di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Nagari Sulit Air menjadi salah satu nagari yang di tunjuk menjadi *pilot project* sebagai Nagari Binaan Kerjasama Rantau di Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sulit Air memiliki potensi untuk di berdayakan melalui kerjasama dengan perantau dan pembinaan dari pemerintah. Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau berperan untuk meningkatkan kemampuan atau potensi daerah dalam mencapai target pembangunan melalui pesinergian potensi sumber daya yang dimiliki dengan mengadakan kerjasama, pengendalian percepatan pembangunan dan pembinaan masyarakat baik di ranah ataupun di rantau.

Pada tahun 2018 Biro kerjasama Pembangunan dan Rantau membuat kebijakan untuk nagari yang di tunjuk sebagai nagari binaan rantau harus membuat *Grand Desain* atau *Masterplan* sebagai konsep pembangunan yang akan dikerjasamakan dengan perantau. Di Nagari Sulit Air objek yang dapat dikembangkan sebagai branding yaitu objek wisata Janjang Seribu, perantau mendukung pengembangan objek wisata tersebut dan diikat dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan bersama antara perantau Nagari Sulit Air dan Pemerintahan Nagari Sulit. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Bagian Rantau, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Ibu Hilma SE, M. Si:

“Dalam melakukan kerjasama pembangunan dengan perantau, nagari memiliki branding untuk di promosikan, disepakati dengan perantau mengenai branding tersebut, kemudian harus diikat dengan MoU agar mengikat antara ranah dan rantau, lalu dibuatlah rencana aksinya”. (wawancara dengan Kepala Bagian Rantau, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Ibu Hilma SE, M. Si pada 16 September 2019)

Sebagai tindak lanjut kesepakatan antara nagari dan perantau, maka di Nagari Sulit Air dibuatlah *masterplan* sebagai dokumen perencanaan agar memiliki konsep dalam pembangunan tersebut. Dalam Pembuatan *masterplan*, pemerintahan Nagari Sulit Air juga bekerjasama dengan Nagari Development Center (NDC) Unand, dimana NDC akan meninjau ke lokasi pembangunan. Pada pembiayaan pembuatan *masterplan* ini, sebagai bentuk kerjasama maka dananya bersumber dari PAD nagari dan dari perantau, dimana pemerintah nagari mematok dana sebesar Rp. 30 Juta dan perantau sebesar Rp. 45 Juta.

Dalam bantuan dana yang diberikan oleh perantau kepada Pemerintahan Nagari, setelah pemerintah nagari melakukan sinkronisasi program pembangunan atau pemerintahan nagari bekerjasama dengan perantau seperti halnya pembuatan *masterplan* dan juga jika ada program pembangunan yang di patok oleh dana nagari maka pihak nagari berusaha mencari swadaya masyarakat rantau. Dalam memberikan bantuan dana, SAS selain memberikan dana bantuan melalui kas organisasi juga lebih bersifat memfasilitasi perantau untuk memberikan bantuan berupa dana (uang) dalam memperlancar pembangunan nagari.

Sangat jelas pentingnya peran perantau dalam pembangunan daerahnya. Hal ini dapat terjadi karena mereka merupakan bagian dari masyarakat nagari yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan suatu pembangunan demi kemajuan daerahnya asalnya. Perantau memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nagari, sehingga Pemerintahan Nagari dapat melakukan kerjasama dengan perantau mengenai pembangunan nagari. Dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan Perantau, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 96 Tahun 2017, kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan perjanjian kerjasama, penandatanganan pelaksanaan dan pelaporan. Kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau tentunya terjadi melalui tahapan-tahapan untuk mencapai kerjasama. Mulai dari tahap inisiasi yang menjelaskan bagaimana awal dari kerjasama itu terjadi dan kerjasama tersebut atas prakarsa dari pihak yang mana sampai pada tahap pelaporan kerjasama. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Nagari dengan Perantau dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi maka penulis mengemukakan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Nagari dengan Perantau dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Nagari dengan Perantau dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini nantinya memberikan informasi atau bahan kepustakaan pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Nagari Dengan Perantau dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah untuk dapat memberikan perkembangan yang lebih baik lagi dalam pembangunan daerahnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

